

Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi

Hery Haryanto^{1✉}, Jenny Yang², Nicholas³, Jesslyn Larissa⁴, Oktris Susanti⁵, Narumi Yuki⁶

Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam, Batam

Abstrak

Kenaikan inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan inflasi yang terus menerus dapat mempengaruhi tingkat pengangguran sebab inflasi yang terlalu tinggi dapat mendorong kenaikan suku bunga sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif dan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman pengangguran yang akan terjadi pasca inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atas data tahun 2022 di mana terjadi inflasi global yang berdampak pada seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Kata Kunci: Pengangguran, Inflasi, Indonesia

Copyright (c) 2022 Hery Haryanto

✉ Corresponding author :

Email Address : hery.haryanto@uib.edu

PENDAHULUAN

Dalam kinerja ekonomi, terdapat dua indikator yang menjadi perhatian yakni inflasi dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang lambat dan meningkatnya inflasi itu merupakan hal yang biasanya dialami oleh negara berkembang. Tidak hanya itu, pengangguran juga merupakan salah satu masalah ekonomi suatu negara. Inflasi adalah kecenderungan harga-harga secara umum dan terus-menerus untuk naik (Boediono, 1999). Kenaikan harga satu atau dua komoditi saja bukanlah inflasi, kecuali jika kenaikan itu meluas atau menyebabkan kenaikan pada sebagian besar komoditi lainnya. Inflasi dapat memiliki efek yang luas, sehingga dapat dianggap sebagai penyakit ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Inflasi yang tinggi sangat penting dalam mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian dan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, termasuk depresiasi nilai tukar. Indonesia termasuk dengan yang terkena inflasi. Dilansir dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi di Indonesia dari bulan Januari–September 2022 sebesar 4,84 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 5,95 persen. Berikut ini adalah data inflasi dari tahun 2017-2021.

Tabel 1. Inflasi Indonesia Tahun 2017-2021

Tahun	Persentase Inflasi
2017	3,61 %

2018	3,13%
2019	2,72%
2020	1,68%
2021	1,87%

Sumber: bps.go.id

Menurut Sukirno (2007), pengangguran adalah mereka dalam angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan dengan upah tertentu, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang diinginkan. Pertumbuhan ekonomi dapat menyerap lebih sedikit tenaga dibandingkan jumlah pencari kerja setiap tahunnya, dan jumlah pengangguran di Indonesia meningkat karena sisa pencari kerja tidak dapat memperoleh pekerjaan (Ariefta, 2014). Jika tingkat pengangguran terlalu tinggi, maka akan mempengaruhi stabilitas nasional negara manapun. Dengan ini, setiap negara berusaha untuk menjaga pengangguran pada tingkat yang wajar. Dilansir dari situs newssetup.kontan.co.id, berdasarkan data dari BPS, tercatat tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dan belum kembali ke posisi sebelum pandemi. Hal tersebut tersebut karena di masa awal pandemi banyak perusahaan melakukan tindakan PHK untuk mengecilkan biaya perusahaan tersebut sehingga tingkat pengangguran terus meningkat. Berikut ini adalah data pengangguran di Indonesia dari tahun 2018-2021.

Dengan tingginya angka inflasi dan pengangguran di Indonesia, pemerintah seharusnya membuat suatu kebijakan agar permasalahan ekonomi tersebut dapat teratasi. Menurut Hoogerwerf, kebijakan pemerintah adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah suatu masalah melalui metode-metode tertentu, tindakan-tindakan yang terarah.

Gambar 1. Tingkat Pengangguran di Indonesia



Sumber: newssetup.kontan.co.id

Maka dari itu, artikel ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan apa saja kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi dan pengangguran, jenis-jenis dalam

permasalahan tersebut dan akibat buruk dari permasalahan tersebut. Lalu, alasan dari pembuatan artikel ini adalah agar dapat menjadi salah satu sarana informasi mengenai kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca inflasi.

METODOLOGI

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang melakukan penelitian secara mendalam pada suatu objek atau fenomena yang alamiah. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan objek atau fenomena tersebut dengan sedetail dan sejelas mungkin. Dalam metode ini, peneliti juga mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk membantu proses penelitian. Metode penelitian kualitatif menggunakan data lapangan yang terkumpul dan teori-teori pendukung untuk menghasilkan analisis dari data-data tersebut.

Untuk mengumpulkan data penulis lakukan dengan metode observasi. Metode observasi didefinisikan sebagai metode yang melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi. Atau pengamatan terhadap objek atau fenomena dan melakukan pencatatan terhadap kondisi atau perilaku objek atau fenomena yang diteliti. Dari pengamatan tersebut, peneliti dapat mengumpulkan informasi dan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Metode observasi sangat umum digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif.

Setelah proses pengumpulan data, data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif, sehingga penelitian ini bisa dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Analisis yang mendalam dilakukan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menjelaskan suatu objek atau fenomena secara lengkap dan faktual atau sesuai dengan fakta sebenarnya. Dalam penelitian deskriptif, fokus utama yang dibutuhkan adalah menggambarkan objek penelitian dengan mendalam dan terperinci. Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi pada skala nasional. Lokasi penelitian yang kami pilih adalah Negara Indonesia. Jumlah pulau di Indonesia mencapai lebih dari 17.000 pulau sehingga membuat Indonesia mendapat julukan Negara kepulauan terbesar di dunia. dan dua pertiga wilayah negara berupa lautan. Berdasarkan segi geografis, Indonesia berada diantara benua dan samudra yakni samudra Hindia dan Pasifik dan juga Benua Asia dan Australia. Lokasi yang strategis dan berada di jalur perdagangan dunia ini menyebabkan keuntungan bagi Indonesia di segi ekonomi. Waktu penelitian yang kami pilih adalah tahun 2022, di mana terjadi inflasi global yang berdampak terhadap dunia, tidak terkecuali Negara Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa tingkat inflasi dan pengangguran meningkat semenjak pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan melemahnya ekonomi yang terjadi secara global. Tidak hanya itu, perang Rusia dengan Ukraina juga menyebabkan Indonesia tidak dapat mengimpor gandum dan minyak dari negara yang bersangkutan, sehingga menyebabkan harga gandum dan minyak yang tinggi. Dikarenakan inflasi yang tinggi ini pula, banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tutup karena bangkrut, bahkan perusahaan-perusahaan besar yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada

karyawan-karyawannya. Dengan alasan inilah tingkat inflasi dan pengangguran masih belum dapat mereda hingga angka sebelum pandemi. Pemerintah telah dan masih melakukan upaya-upaya yang dapat menurunkan tingkat inflasi dan pengangguran di tahun 2022 ini.

Angka inflasi yang rendah dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun bila angka inflasi terlalu tinggi, maka dapat merugikan masyarakat dan negara itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah selama ini telah berupaya agar angka inflasi tersebut berada pada tingkat yang wajar. Namun, ketika pandemi Covid-19 melanda, pertumbuhan inflasi meningkat cukup signifikan. Berikut merupakan kebijakan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Kebijakan pertama berupa kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah, seperti menaikkan tarif pajak dari 10% menjadi 11% yang bertujuan untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, hal ini dapat mengurangi daya beli masyarakat. Namun, hal ini kurang efektif karena masyarakat akhirnya kembali konsumtif setelah dua tahun pandemi. Selain itu, pemerintah juga mengurangi pengeluaran agar postur fiskal lebih efisien dan tidak berlebihan.

Lalu, pemerintah juga melakukan larangan ekspor batu bara dan *crude palm oil* (CPO). Larangan ekspor batu bara dilakukan agar tidak terjadinya krisis energi di Indonesia, seperti yang dialami oleh beberapa negara. Sebelumnya, harga CPO sempat melonjak di akhir tahun 2021 hingga di awal 2022. Kebijakan larangan ekspor CPO ini dilakukan agar harga minyak goreng dapat menurun karena CPO sempat mengalami inflasi yang cukup tinggi. Namun, larangan ekspor CPO dicabut karena tingkat produksi dalam negeri yang terlalu tinggi.

Pemerintah juga sempat melakukan Operasi Pasar Terbuka (OPT) sebagai bentuk kebijakan moneter. OPT dilakukan agar pemerintah dapat memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau.

Selain OPT, pemerintah juga melakukan Kerja sama Antar Daerah (KAD). KAD dilakukan dengan tujuan menjaga ketersediaan komoditas pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama terutama bagi daerah surplus dan daerah defisit, di mana daerah-daerah tersebut memiliki ketersediaan komoditas dengan harga yang tidak stabil. Bila harga komoditas pangan stabil, maka tingkat inflasi dapat ditekan oleh pemerintah.

Selain menangani tingkat inflasi yang cukup tinggi, pemerintah juga perlu menangani tingkat pengangguran yang juga meningkat akibat dari tingginya inflasi sehingga banyak UMKM yang tutup dan perusahaan besar yang melakukan PHK terhadap pekerjanya. Berikut merupakan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada tahun 2020, pemerintah sempat melakukan insentif pajak untuk meringankan beban masyarakat wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19, seperti Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21, PPH pasal 22 impor, angsuran PPH pasal

25, dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan adanya insentif pajak ini, masyarakat sedikit terbantu dan dapat meningkatkan daya beli mereka agar roda ekonomi dapat terus berjalan. Insentif pajak ini diperpanjang hingga tahun 2021 dan kini masih ada beberapa insentif pajak yang diperpanjang hingga akhir tahun 2022.

Selanjutnya, pemerintah juga melaksanakan program kartu prakerja. Program ini dibentuk sebagai upaya bantuan bagi masyarakat khususnya yang terkena PHK dan yang masih mencari kerja. Dengan adanya program ini, masyarakat yang mengikuti program ini sebagai peserta akan mendapatkan pelatihan secara gratis dan mendapatkan insentif berupa uang bagi yang lolos seleksi program kartu prakerja ini.

Pemerintah juga selalu membuka lapangan kerja setiap tahunnya. Begitu juga pada tahun ini, pemerintah tetap akan membuka lapangan pekerjaan agar ekonomi dapat terus berjalan. Ditambah dengan adanya proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan atau lebih dikenal dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek yang besar ini tentunya membutuhkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar pula. Oleh sebab itu, proyek yang dikeluarkan pemerintah ini dapat membantu orang-orang yang tidak berkesempatan bekerja.

Meski dengan kebijakan dan upaya yang telah dan masih dilakukan oleh pemerintah, angka inflasi tetap tidak dapat menurun pada saat artikel ini ditulis. Hal ini diakibatkan oleh perekonomian dunia di mana negara-negara maju juga terkena inflasi yang sangat tinggi. Namun, tingkat pengangguran pada bulan Agustus 2022 menurun dari periode sebelumnya yaitu di bulan Februari 2022. Hal ini menunjukkan terdapat dampak baik yang dihasilkan dari kebijakan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan tim-tim yang membantunya.

SIMPULAN

Tingkat inflasi dan pengangguran meningkat sejak pandemi yang menyebabkan banyak UMKM bangkrut dan perusahaan melakukan PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) secara besar-besaran. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi inflasi yang terjadi di Indonesia antara lain yaitu menaikkan tarif pajak dari 10% menjadi 11%, melakukan larangan ekspor batu bara dan crude palm oil (CPO), melakukan Operasi Pasar Terbuka (OPT), dan melakukan Kerja sama Antar Daerah (KAD). Meski telah dilakukan berbagai upaya tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi inflasi masih belum berdampak pada saat artikel ini dibuat. Inflasi yang tinggi membuat tingkat pengangguran menjadi tinggi. Kebijakan pemerintah Indonesia atas permasalahan ini antara lain adalah melakukan insentif pajak untuk meringankan beban masyarakat wajib pajak, melaksanakan program kartu prakerja, membuka lapangan kerja setiap tahunnya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia terlihat ada hasil yang baik sebab ada penurunan tingkat pengangguran.

Referensi :

Agustiana, L. E. (2020). PENGARUH WABAH COVID-19 TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PADA SEKTOR TERDAMPAK DI INDONESIA. 1(6). doi: 10.31933/JIMT

Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved from <https://bps.go.id/>

- Dinamika, U., Jambi, B., Batang, N., & Muara Bulian, H. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19 Ayu Feranika, Dini Haryati.
- Helbawanti, O., Saputro, W. A., & Ulfa, A. N. (2021). PENGARUH HARGA BAHAN PANGAN TERHADAP INFLASI DI INDONESIA. In *Agrisaintifika Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian* (Vol. 5, Issue 2).
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2). doi: 10.31294/jp.v17i2
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(6), 509–518. doi: 10.15408/sjsbs.v7i6.15363
- Mardiyah, R. A. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENINGKATAN ANGKA PENGANGGURAN DI INDONESIA.
- Penelitian Deskriptif, Tujuan Hingga Contohnya. (n.d.). Retrieved from <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-deskriptif-tujuan-hingga-contohnya/>
- Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap. (n.d.). Retrieved from <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>
- Purba, D. S., & Tarigan, V. (2021). ANALISIS TINGKAT INFLASI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID 19. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 2614–7181. doi: 10.36985/ekuilnmi.v3i1.74
- Sihaloho, E. D. (2022). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. doi: 10.13140/RG.2.2.14524.67205
- Sri Kasnelly, F. Abd. J. (2020). MENINGKATNYA ANGKA PENGANGGURAN DITENGAH PANDEMI (COVID-19).
- Tinjauan Kebijakan Moneter Agustus 2022. (n.d.). Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Agustus-2022.aspx>
- Wibawa, P. A. C. C. G., & Putri, N. K. C. A. (2021). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI COVID 19. Retrieved from <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>